



LAPORAN KAJIAN

Kegiatan Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pontianak

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK
SUBBID LITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Laporan kajian ini adalah dokumen dari kegiatan kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan BPS Kota Pontianak.

Laporan ini berisikan mengenai efektivitasnya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD dalam menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2014-2019.

Laporan ini telah diselesaikan dengan merhimpun hasil seminar Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan menghadirkan nara sumber dari BPS Kota Pontianak, Fakultas Ekonomi Untan dan SKPD terkait yang menangani masalah kemiskinan.

Akhir kata semoga laporan kajian ini dapat bermanfaat, dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya laporan ini diucapkan terima kasih.

Pontianak, Desember 2019

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG.....	1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3	SASARAN DAN MANFAAT	3
1.4	RUANG LINGKUP	4
1.4.1	Ruang Lingkup Wilayah.....	4
1.4.2	Ruang Lingkup Kegiatan.....	4
1.5	SISTEMATIKA LAPORAN	5
BAB II	GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK	
BAB III	LANDASAN TEORI DAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA	
	PONTIANAK.....	6
BAB IV	KAJIAN DAN ANALISIS.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Geografis Kota Pontianak.....	7
Gambar 2 Peta Wilayah Kota Pontianak.....	9
Grafik 3 Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Provrty Gap) Kota Pontianak Tahun 2015-2018	16
Gambar 1 Siklus Kemiskinan dari Sisi Pendapatan	21
Gambar 2 Siklus Kemiskinan dari Sisi Tabungan	22
Gambar 3 Siklus Kemiskinan dari Sisi Konsumsi.....	23
Grafik 4 Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Provrty Gap) Kota Pontianak Tahun 2015-2018	32
Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak Tahun 2015- 2017	33
Gambar Skenario dan Fokus Pembangunan Tahunan di Kota Pontianak Periode 2015-2019.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kelurahan	8
Tabel 2 Jumlah Kelurahan, RT dan RW di Kota Pontianak.....	8
Tabel 3 Penduduk, PDRB & PDRB Perkapita di Kota Pontianak	11
Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kecamatan Kota Pontianak Tahun 2010-2014.....	12
Tabel 5 Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2015-2018.....	14
Tabel 1 Garis Kemiskinan di Kota Pontianak, 2008-2018	36
Tabel 2 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2018	37
Tabel 3 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin (PO) di Kota Pontianak, 2008-2018	38
Tabel 4 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018.....	38
Tabel 5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018.....	39
Tabel 6 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2015-2018.....	40
Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah masalah kemiskinan, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas, padahal setiap tahun anggaran selalu dianggarkan pendanaan untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagai misi utama disamping misi-misi yang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa upaya menurunkan tingkat kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.

Kondisi kemiskinan di Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi pada tahun 1998. Namun ketika pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun akibat krisis dapat teratasi dan dapat dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. Pada tahun 1999, 27% dari total penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebanyak 33,9% penduduk desa dan 16,4% penduduk kota adalah orang miskin.

Salah satu prasyarat keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan wilayah sasaran dengan tepat. Program pengentasan dan pemulihan nasib orang miskin tergantung dari langkah awal yaitu

ketetapan mengidentifikasi siapa yang dikatakan miskin dan di mana dia berada. Aspek di mana "si miskin" dapat ditelusuri melalui si miskin itu sendiri serta melalui pendekatan-pendekatan profil wilayah atau karakter geografis.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Faktor mendasar yang menyebabkan kemiskinan diantaranya adalah SDM, SDA, Sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin, sehingga dimensi tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan permasalahan diatas dilakukannya kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan *kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak* adalah untuk melihat efektifnya program dan kegiatan pada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Pontianak.

Kemudian Kegiatan *kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak* bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi dan melihat sejauh mana cakupan dan efektifnya program dan kegiatan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak.
2. Mengidentifikasi apakah ada pengaruh yang sangat kuat dan korelasi antar OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak.
3. Menganalisis pengaruh dukungan APBD dalam menunjang program dan kegiatan yang ditujukan langsung untuk menangani masalah kemiskinan di Kota Pontianak.
4. Menyusun rekomendasi-rekomendasi dan action plan yang dapat direalisasikan agar efektivitas program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak dapat tercapai selaras dengan program kegalatan Pemerintah Kota Pontianak dalam RPJMD 2020 - 2024

1.3 SASARAN DAN MANFAAT

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan *kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak* adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada di beberapa OPD apakah dapat berjalan baik dan efektif.
2. Adanya atau ditemukannya gambaran program dan kegiatan mana saja yang efektif dan tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.
3. Tersusunnya rekomendasi-rekomendasi dan action plan yang dapat direalisasikan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Pontianak.

Sedangkan *Manfaat* yang dapat diperoleh adalah:

- a. Hasil kajian ini sebagai dasar pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Pontianak,
- b. Hasil kajian ini sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan yang paling tepat dan efisien dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Pontianak.
- c. Hasil kajian ini sebagai instrument / alat untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah yang dikaji dalam kegiatan *kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak* ini meliputi seluruh wilayah Kota Pontianak.

1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Secara umum lingkup kegiatan *kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak* yang akan dilaksanakan adalah :

1. Tahap persiapan
2. Tahap pengumpulan data dari tiap OPD
3. Survey lapangan
4. Melakukan Focus Group Discussion (FGD)
5. Melakukan Rapat Kerja bersama OPD terkait
6. Penyusunan laporan kajian, rekomendasi dan *action plan*

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akhir kegiatan *penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak* disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar hal-hal pokok yang akan dibahas dalam kegiatan ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, sasaran, keluaran serta ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan materi.

Bab II Gambaran Umum Kota Pontianak

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kota Pontianak.

Bab III Landasan Teori dan Angka Kemiskinan di Pontianak

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini serta menggambarkan angka kemiskinan di Kota Pontianak saat ini.

Bab IV Kajian dan Analisis

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan analisis untuk mengetahui efektivitas program dan kegiatan *penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak*.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari tahapan yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kajian ini.

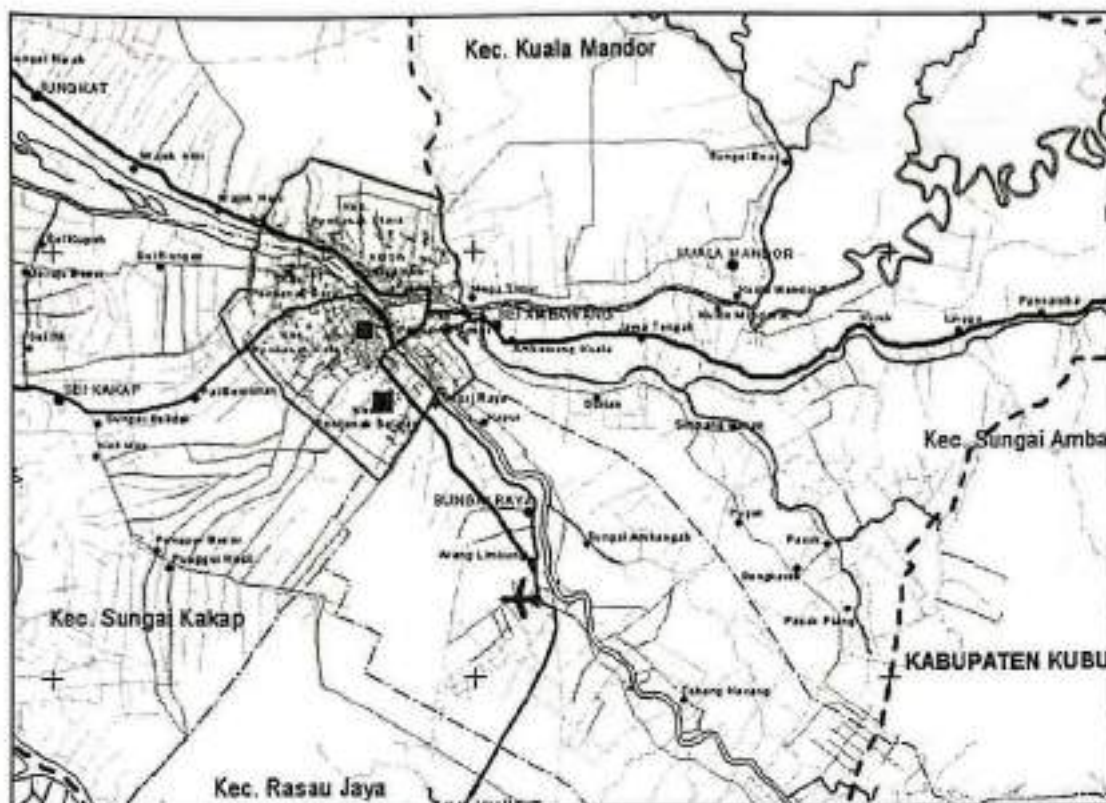
BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK

Secara geografi, wilayah Kota Pontianak berdekatan dengan beberapa pusat pertumbuhan regional yaitu Batam, Pekanbaru, Natuna, Jakarta, Balikpapan dan Pangkalan Bun. Kota Pontianak letaknya juga tidak jauh dari Negara Asean yang cukup berkembang seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Bahkan Kota Pontianak berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia, sehingga menjadi beranda terdepan Negara Indonesia dalam berinteraksi langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 6 kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan, 550 Rukun warga (RW) dan 2.475 Rukun Tetangga (RT) dengan luas mencapai 107,82 km². Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

Bagian Selatan	:	Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
Bagian Timur	:	Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Bagian Barat	:	Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
Bagian Utara	:	Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak dan Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya



Gambar 1
Peta Geografis Kota Pontianak

Kota Pontianak secara geografis berada pada $0^{\circ}02'24''$ Lintang Utara sampai dengan $0^{\circ}05'37''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}23'01''$ Bujur Timur sampai dengan $109^{\circ}16'25''$ Bujur Timur. Karena terletak di Lintasan Garis Khatulistiwa, maka Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota Khatulistiwa atau kota equator.

Dalam sistem Pulau Kalimantan, Kota Pontianak memiliki interaksi dalam sistem pelayaran Indonesia Bagian Barat dan Negara Tetangga (Malaysia, Singapura dan China). Maka dari itu peran Pelabuhan di Kota Pontianak sangat penting dalam kelancaran sistem angkutan Laut di wilayah Indonesia dan Internasional. Pelabuhan antar pulau Dwikora Kota Pontianak juga didukung dengan pelabuhan antar wilayah Kabupaten di Kalimantan Barat melalui pelabuhan Sheng Hie, pelabuhan ini melayani angkutan Pontianak-Ketapang, Pontianak-Teluk Melano (Kabupaten Kayong Utara), Pontianak-Sukadana (Kabupaten Kayong Utara) dan lain-lain.

Tabel 1
Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)	% terhadap Kota Pontianak
1	Pontianak Barat	1 Pal Lima	5.80	5.38
		2 Sungai Jawi Dalam	2.34	2.17
		3 Sungai Jawi Luar	2.95	2.74
		4 Sungai Bellung	2.15	1.99
		Sub Total	13.24	12.28
2	Pontianak Timur	1 Parit Mayor	1.49	1.38
		2 Banjar Serasan	1.20	1.11
		3 Saigon	2.68	2.49
		4 Tanjung Hulu	1.97	1.83
		5 Tanjung Hillir	0.74	0.69
		6 Dalam Bugis	1.29	1.20
		7 Tambelan Sampit	0.41	0.38
		Sub Total	9.78	9.07
3	Pontianak Utara	1 Siantan Hulu	9.20	8.53
		2 Siantan Tengah	13.41	12.44
		3 Siantan Hillir	7.87	7.30
		4 Batu Layang	9.20	8.53
		Sub Total	39.68	36.80
4	Pontianak Selatan	1 Benua Melayu Darat	2.68	2.49
		2 Benua Melayu Laut	0.57	0.53
		3 Parit Tokaya	5.22	4.84
		4 Akcaya	3.19	2.96
		5 Kota Baru	2.56	2.37
		Sub Total	14.22	13.19
5	Pontianak Kota	1 Sungai Bangkong	6.20	5.75
		2 Darat Sekip	1.31	1.21
		3 Tengah	0.95	0.88
		4 Mariana	0.50	0.46
		5 Sungai Jawi	7.02	6.51
		Sub Total	15.98	14.82
6	Pontianak Tenggara	1 Bangka Belitung Darat	2.90	2.69
		2 Bangka Belitung Laut	2.33	2.16
		3 Bansir Darat	6.73	6.24
		4 Bansir Laut	2.96	2.75
		Sub Total	14.92	13.84
Total Kota Pontianak			107.82	100.00

Tabel 2
Jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kota Pontianak

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
Pontianak Selatan	5	91	404
Pontianak Tenggara	4	43	178
Pontianak Timur	7	77	363
Pontianak Barat	4	103	548
Pontianak Kota	5	120	499
Pontianak Utara	4	116	483
Jumlah	29	550	2.475

Struktur Ekonomi Kota Pontianak

Perekonomian yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 27,85 Trilyun Rupiah dan atas dasar harga konstan mencapai 20,86 Trilyun Rupiah. Ekonomi Kota Pontianak tumbuh 5,13 persen ^{pada tahun} melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,97 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,3 persen. Perekonomian Kota Pontianak Tahun 2015 mengalami perlambatan, utamanya disebabkan menurunnya kinerja lapangan usaha konstruksi dan industri pengolahan yang merupakan dua dari tiga lapangan usaha terbesar yang mempengaruhi perekonomian Kota Pontianak. Lapangan usaha konstruksi terkoreksi sebesar 5,16 persen dari tahun 2014 sementara Industri pengolahan terkoreksi sebesar 3,57 persen.

Sejak digunakannya tahun dasar 2010 dalam penghitungan PDRB, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam 17 kategori, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian tumbuh sebesar 5,13 persen, Struktur ekonomi didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi dan Industri Pengolahan, Kinerja tertinggi dicapai oleh kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan menyumbang pertumbuhan 1,28 persen dari total pertumbuhan (5,13 persen).

Struktur Perekonomian Dacrah

Kinerja perekonomian Kota Pontianak secara sektoral pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,04 % dan ditandai dengan peningkatan pada setiap sektornya, meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,04 poin dibanding tahun 2012 yang tumbuh sebesar 6,07 %. Semua sektor ekonomi pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan-komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 8,71 %, diikuti oleh sektor Bangunan 5,95 %, sektor keuangan-persewaan-jasa perusahaan 5,68 %, sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 5,48 %, sektor jasa-jasa 5,28 %, sektor Listrik dan air bersih 4,37 %, sektor Pertanian sebesar 4,01 % dan sektor industri pengolahan 3,74 %.

Peningkatan kinerja sektor Perdagangan Hotel dan Restoran pada 2013 antara lain diindikasikan dengan peningkatan volume bongkar melalui pelabuhan Kota Pontianak yang tercatat sebesar 1,41 juta ton atau meningkat 11,44 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,27 juta ton, demikian pula peningkatan penerimaan pajak restoran serta kecenderungan kenaikan rata-rata tingkat hunian hotel berbintang maupun non bintang semakin memperkuat sektor PHR pada perekonomian Kota Pontianak. Sementara dalam periode yang sama, sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor Industri Pengolahan meskipun pada tahun 2012 kinerja sektor ini menguat 0,21 poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 3
Penduduk, PDRB & PDRB Perkapita di Kota Pontianak

No.	Kecamatan	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita
1	Pontianak Selatan	87.955	6.816.465,59	77.499.466,65
2	Pontianak Tenggara	48.646	2.036.531,75	41.864.320,75
3	Pontianak Timur	88.761	1.693.112,79	19.074.962,99
4	Pontianak Barat	133.239	4.298.040,001	32.258.122,63
5	Pontianak Kota	118.274	6.167.905,336	52.149.291,78
6	Pontianak Utara	121.222	4.068.294,669	33.560.695,82
	Jumlah	598.097,00	25.080.350,13	41.933.583,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Angka sementara

Pertumbuhan Ekonomi

Indikator utama yang sering digunakan oleh para ekonom untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi suatu negara atau daerah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari aktivitas perekonomian suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari perkembangan PDRB harga konstan suatu daerah dari tahun ke tahun. Tingginya pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tenaga kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas, teknologi yang dipergunakan, sumber daya alam

yang dimiliki dan sebagainya; sedangkan faktor eksternal dapat berupa kondisi perekonomian dunia pada umumnya, investasi dari luar daerah (arus keluar masuknya modal) serta ekspor dan impor barang dan jasa.

Setelah dilanda krisis ekonomi secara Nasional sejak tahun 1997 yang lalu, kondisi perekonomian Kota Pontianak sedikit demi sedikit mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, walaupun masih di bawah angka pertumbuhan Nasional. Selama kurun waktu 2011 - 2015 menunjukkan pertumbuhan dengan trend yang cenderung bervariasi. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sebesar 7,20 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak berdasarkan harga konstan tahun 2010, selama tahun 2012 hingga tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan dengan trend yang relatif berfluktuasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak selama kurun waktu 2012 - 2014 dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kecamatan Kota Pontianak Tahun 2010-2014

No.	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pontianak Selatan	-	5,53	8,26	8,21	6,25
2	Pontianak Tenggara	-	5,14	8,69	8,45	6,24
3	Pontianak Timur	-	3,76	5,20	6,70	5,94
4	Pontianak Barat	-	5,22	7,61	8,05	6,07
5	Pontianak Kota	-	5,65	8,74	8,30	6,34
6	Pontianak Utara	-	3,76	6,35	6,64	4,75
	Kota Pontianak	-	5,05	7,77	7,86	5,97

Indeks Pembangunan Manusia

Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran kemajuan pembangunan manusia secara umum, yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, tampak bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kota Pontianak cukup signifikan. Angka IPM Kota Pontianak mengalami peningkatan dari 72,41 pada tahun 2009 menjadi 77,52 pada tahun 2015.

Kenaikan IPM ini diperkirakan karena dampak dari investasi di bidang kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM baru akan terlihat

nyata dalam jangka panjang. Pembangunan di Kota Pontianak telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin baik secara absolut maupun jumlah persentasenya. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak mengalami penurunan dari 52,80 ribu jiwa di tahun 2008 menjadi 34.39 ribu jiwa di tahun 2010, atau turun dari 9,29 % di tahun 2008 menjadi 5,77 % di tahun 2012. Pada tahun 2014 menurun menjadi 30,75 ribu atau 5,13%.

Indikator utama Pembangunan pada analisis mikro ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi tujuan dari IPM, yaitu:

1. Dimensi Umur Panjang dan Sehat, indikator dari dimensi umur panjang dan sehat adalah angka harapan hidup. Di Kota Pontianak angka harapan hidup pada tahun 2015 sebesar 72,11 tahun, sementara standart UNDP nilai maksimum angka harapan hidup 85 tahun.
2. Dimensi Pengetahuan, indikator pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Di Kota Pontianak angka melek huruf pada tahun 2015 sebesar 95,87, sementara standart UNDP nilai maksimum angka melek huruf 100; adapun rata-rata sekolah di Kota Pontianak 9,77 tahun sedangkan standart UNDP 15 tahun.
3. Dimensi Kehidupan yang layak, indikator dari dimensi ini adalah pengeluaran perkapita riil perbulan yang disesuaikan. Pada tahun 2015 pengeluaran riil perkapita Kota Pontianak Rp. 645.460,- sedangkan standart UNDP Rp. 737,720,-.

Persentase Penduduk di Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan setiap Kabupaten dan Kota berbeda satu dengan yang lain, mengingat setiap kabupaten kota memiliki harga bahan pokok makanan dan non makanan yang berbeda-beda sehingga uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan juga akan menjadi berbeda di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh NKRI.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Garis Kemiskinan Kota Pontianak selalu mengalami peningkatan, dari Rp 403.905,00 di tahun 2015 menjadi Rp 483.618,00 di tahun 2018. Hal ini berarti terdapat peningkatan harga makanan maupun makanan yang tergolong sebagai kebutuhan dasar dari tahun ke tahun di Kota Pontianak. Pada tahun 2018, dibutuhkan biaya sebesar Rp 483.618 untuk setiap orang memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan setiap bulannya. Sehingga, apabila terdapat penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 483.618 setiap bulannya pada tahun 2018 akan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Tabel 5

Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2015-2018

KEMISKINAN	2015	2016	2017	2018
Garis Kemiskinan (Rp.)	403.905	427.783	439.648	483.618
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	31,56	34,13	33,18	31,76
Angka Kemiskinan (persen)	5,22	5,55	5,31	5,00
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan (persen)	94,78	94,45	94,69	95,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2018

Jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 34.130 jiwa dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 31.560. Kondisi sebaliknya terjadi di tahun 2017, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2016 menjadi 33.180 jiwa, dan kembali menurun sebesar 1.419 jiwa menjadi 31.761 jiwa di tahun 2018.

Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan di Kota Pontianak juga mengalami fluktuasi. Dari tahun 2015 hingga tahun 2016, angka kemiskinan di Kota Pontianak mengalami

peningkatan dari 5,22 persen menjadi 5,55 persen di tahun 2016. Angka kemiskinan tersebut kemudian secara perlahan-lahan mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 menjadi 5,31 persen dan 5 persen.

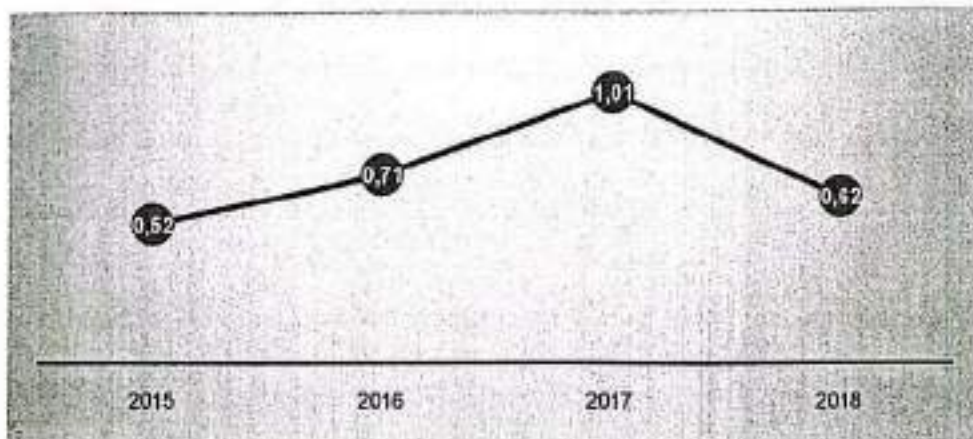
Untuk mengetahui Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan dapat dilihat dari angka kemiskinannya, yakni dengan mengurangi angka 100 dengan angka kemiskinan. Hasilnya menunjukkan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2016 memperlihatkan adanya penurunan yakni dari 94,78 persen di tahun 2015 menjadi 94,45 di tahun 2016. Sementara untuk tahun 2017 dan 2018 Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan meningkat menjadi 94,69 persen dan 95 persen.

Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) atau biasa juga disebut dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran yang dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai *Poverty Gap* berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Rasio Kesenjangan Kemiskinan ini berguna untuk menghitung besarnya jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada tahun 2014, *Poverty Gap Index* Kota Pontianak berada pada angka 0,52 pada tahun 2015. Angka tersebut meningkat di tahun 2016 dan 2017 menjadi 0,71 dan 1,01, namun kemudian kembali menurun di tahun 2018 menjadi 0,62. Ini mengindikasikan adanya perbaikan pada tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Pontianak dikarenakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati Garis Kemiskinan. Gambar di bawah memperlihatkan terjadinya fluktuasi pada Rasio Kesenjangan Kemiskinan Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Grafik 3
Rasio Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap*) Kota Pontianak tahun 2015-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

BAB III

LANDASAN TEORI DAN ANGKA KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK

Definisi Kemiskinan

World Bank (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*) dari individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Pattinama (2009), kemiskinan merupakan suatu kondisi rendahnya akses individu/masyarakat terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Definisi yang lebih spesifik disampaikan oleh BPS (2016), dimana kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar baik itu kebutuhan makanan dan non-makanan. Kebutuhan makanan diartikan sebagai kebutuhan minimum kalori perorang perhari, yaitu 2.100 kilokalori (Suharto dkk, 2002). Sedangkan yang termasuk kebutuhan non-makanan adalah kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Mengacu pada definisi kemiskinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi kehidupan yang sangat kompleks. Dalam laporan ini, definisi kemiskinan akan lebih banyak mengacu kepada definisi yang disampaikan oleh BPS karena variabel-variabel yang digunakan lebih terukur dan jelas.

Kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Kuncoro (1997) dapat diklasifikasi ke dalam 4 macam, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, yaitu keadaan dimana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan minimum. Seseorang termasuk ke dalam golongan miskin absolut

apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Definisi kemiskinan absolut seringkali digunakan dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah karena definisi dan pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu atau perkiraan dampak suatu proyek terhadap kemiskinan. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia untuk dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Bank Dunia menggunakan pendekatan ini karena memudahkan dalam menentukan kemana dana bantuan akan disalurkan dan kemajuan yang dicapai suatu negara dapat dianalisis.

2. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya. Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

3. Kemiskinan struktural yaitu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.

4. Kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata

lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. Menurut Mardimin (1996), kemiskinan kultural terjadi karena budaya masyarakat sendiri yang sudah turun-temurun membuat mereka menjadi miskin.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan menurut Munkner (2001) disebabkan oleh faktor-faktor dan dimensi-dimensi yang berbeda. Secara konseptual, penyebab kemiskinan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (Chalid, 2006).

1. Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang disebabkan faktor alam seperti sumberdaya yang langka dan akibat perkembangan teknologi yang rendah dan juga kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumberdaya alam yang tetap. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti ini pada umumnya tidak mempunyai kesenjangan yang terlalu tinggi (Medah, 2013).

2. Kemiskinan struktural atau kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan suatu sistem supra-struktural politik yang membentuk struktur-struktur sosial. Fenomena di lapang menunjukkan bahwa penduduk miskin tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Misalnya, kebijakan telah membuat sekelompok masyarakat mendominasi penguasaan sarana ekonomi, sementara kelompok masyarakat lainnya tidak memiliki kesempatan. Pada kategori ini, kesenjangan ekonomi masyarakat sangat tinggi antara yang miskin dan yang kaya.

3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul akibat tuntutan tradisi/adat yang membebani masyarakat seperti upacara perkawinan, kematian dan pesta adat lainnya, dan juga sikap mentalitas seperti lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke depan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia umumnya dapat dikategorikan ke dalam bentuk kemiskinan struktural atau buatan, karena secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan akibat dari supra-struktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta dipinggirkannya peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang terindikasi dengan melemahnya tingkat keswadayaan masyarakat.

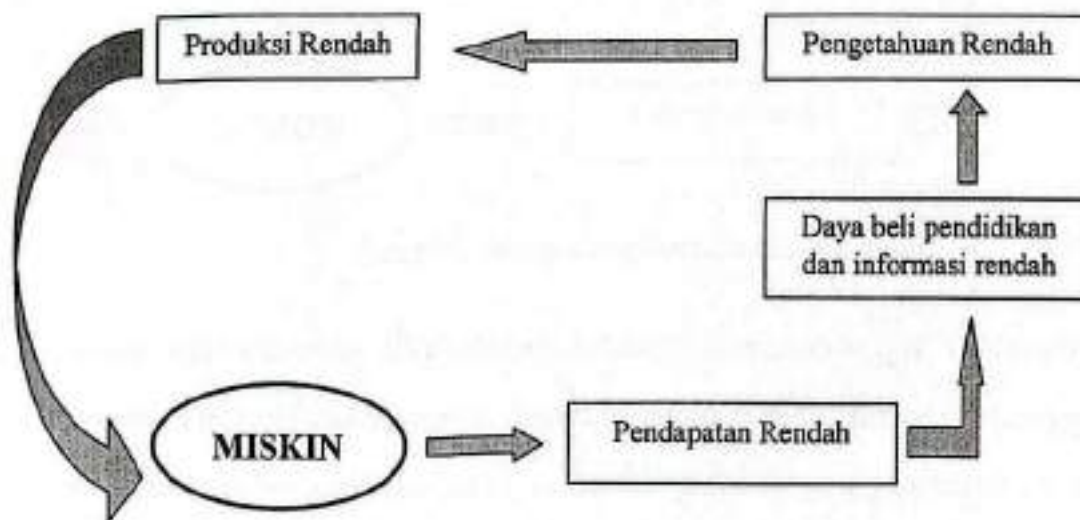
Sumber lain mengklasifikasi penyebab kemiskinan menjadi 2 faktor, yakni: faktor manusia, dan faktor non-manusia.

a. Faktor oleh manusia, meliputi: sikap, pola pikir serta wawasan yang rendah, malas berpikir dan bekerja, kurang keterampilan, pola hidup yang cenderung konsumtif, sikap apatis/egois/pesimis, rendah diri, adanya jarak antara kaya dan miskin, belenggu adat dan kebiasaan, adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya), adanya perusakan lingkungan hidup, pendidikan rendah, populasi penduduk yang tinggi, pemborosan dan kurang menghargai waktu, kurang motivasi mengembangkan prestasi, kurang kerjasama, pengangguran dan sempitnya lapangan kerja, kesadaran politik dan hukum, serta tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam (SDA) setempat (Manurung dalam Bulletin YDS, 1993).

b. Faktor non-manusia, meliputi: faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit, keterisolasian desa, sarana perhubungan tidak ada, kurangnya fasilitas umum, langkanya modal, tidak stabilnya harga hasil bumi, industrialisasi sangat minim, belum terjangkau oleh media informasi, kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa, serta kepemilikan tanah yang kurang merata (Manurung dalam Bulletin YDS, 1993).

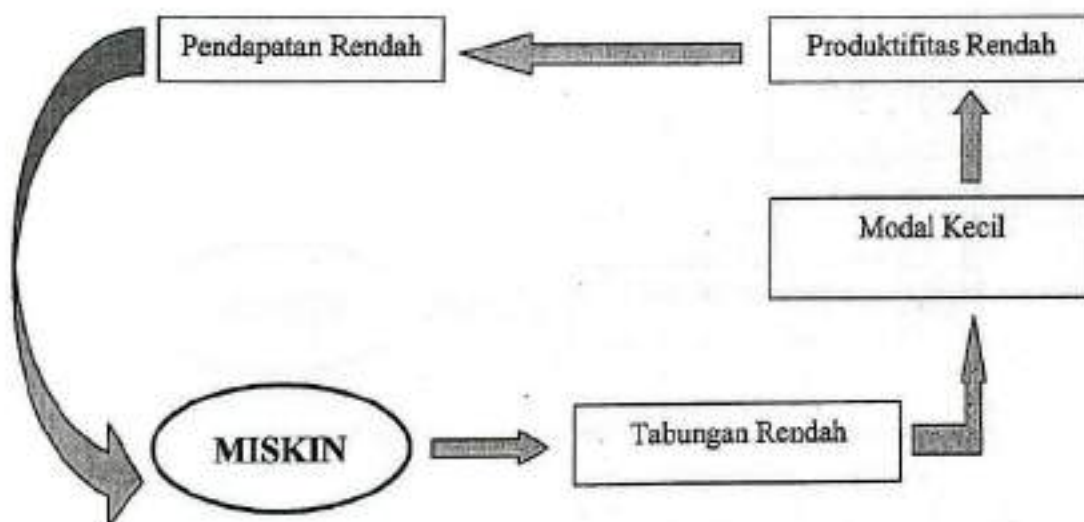
Lingkaran Kemiskinan

Kemiskinan suatu individu atau kelompok masyarakat dapat dikarenakan individu atau kelompok masyarakat tersebut berada dalam suatu siklus yang membawa pada kondisi miskin. Jika dianalisis terdapat tiga siklus kehidupan yang dapat membawa individu atau kelompok masyarakat pada kondisi miskin. Pertama, yaitu jika siklus dilihat dari sektor ekonomi yaitu tingkat pendapatan yang rendah. Seseorang yang miskin memiliki pendapatan rendah dan mengakibatkan si miskin memiliki daya beli yang rendah atas pendidikan dan informasi. Karenanya, si miskin hanya mendapatkan tingkat pengetahuan rendah dan berpengaruh pada tingkat produktifitas yang dihasilkannya juga rendah. Sebagai akibatnya, individu atau kelompok masyarakat tersebut menjadi tetap miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai ada suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah tidak menjadi miskin kembali atau setidaknya memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun siklus ini dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 1. Siklus kemiskinan dari sisi pendapatan.

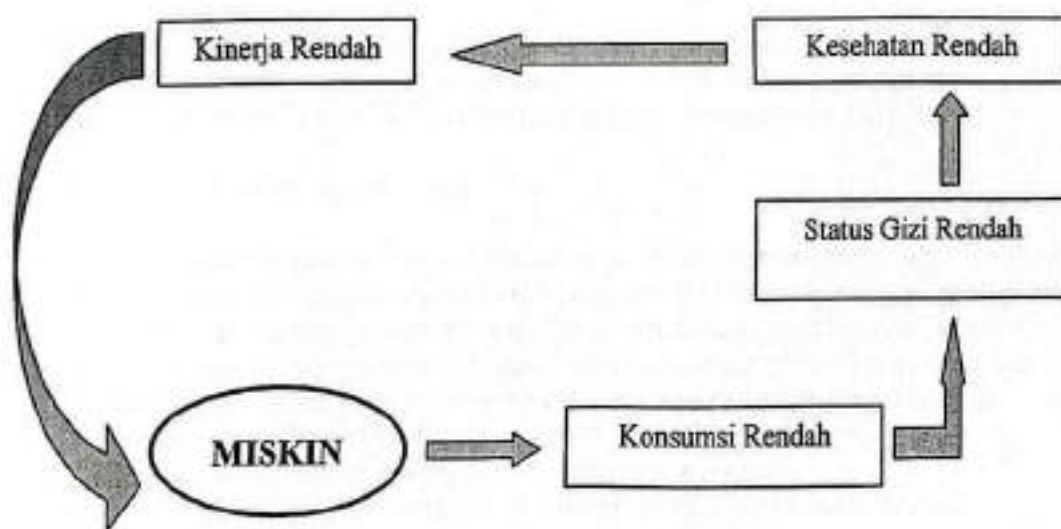
Kedua, yaitu jika siklus dilihat dari sisi tabungan yang mana individu miskin atau suatu kelompok masyarakat miskin memiliki tabungan yang rendah. Tabungan yang rendah menyebabkan si miskin memiliki modal yang kecil untuk usaha atau melakukan aktifitas perekonomian. Secara umum modal yang kecil mengakibatkan tingkat produktifitas rendah sehingga produksi juga rendah. Dikarenakan produksi yang rendah maka pendapatan yang dihasilkan juga rendah. Sehingga, jadilah individu atau kelompok masyarakat tersebut tetap miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai dengan ada suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah atau menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Adapun siklus ini dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus kemiskinan dari sisi tabungan,

Ketiga, yaitu jika siklus dilihat dari sisi konsumsi. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada umumnya individu atau kelompok masyarakat miskin memiliki tingkat konsumsi yang rendah termasuk juga konsumsi atas papan, sarana dan prasarana yang juga masih rendah. Dengan tingkat konsumsi yang rendah dapat menyebabkan status gizi juga rendah. Status gizi yang rendah berakibat pada tingkat kesehatan yang rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang baik pada umumnya didukung oleh gizi yang baik pula. Apabila suatu individu atau kelompok

masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka kinerja yang dihasilkan juga relatif rendah. Kinerja yang rendah menimbulkan tingkat produktifitas juga rendah. Tingkat produktifitas yang rendah menyebabkan individu atau kelompok masyarakat tersebut berada dalam kondisi tetap miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai ada suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah atau menuju pada kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Adapun siklus tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3. Siklus kemiskinan dari sisi konsumsi.

Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pemutahiran basis data terpadu (PBDT) tahun 2015, TNP2K menetapkan 20 indikator kemiskinan yang dikelompokkan ke dalam 5 aspek, yaitu: status kesejahteraan (3 indikator), pendidikan (2 indikator), kesehatan (4 indikator), ketenagakerjaan (3 indikator) dan informasi pokok rumah tangga (8 indikator).

a. Status kesejahteraan

1. Jumlah rumah tangga dan individu, menurut status kesejahteraan
2. Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan menurut kelompok umur

3. Jumlah individu, menurut kelompok usia dan jenis kelamin

b. Pendidikan

1. Jumlah anak bersekolah, menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin
 2. Jumlah anak yang bersekolah dan tidak bersekolah menurut kelompok usia
- c. Kesehatan

1. Jumlah rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat buang air besar
2. Jumlah rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja
3. Jumlah individu yang menderita cacat menurut kelompok usia
4. Jumlah individu yang memiliki penyakit kronis menurut kelompok usia

d. Ketenagakerjaan

1. Jumlah individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok usia
2. Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja menurut lapangan pekerjaan
3. Jumlah individu usia 18-60 tahun yang bekerja menurut lapangan pekerjaan

e. Informasi pokok rumah tangga

1. Jumlah rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati
2. Jumlah rumah tangga menurut status penguasaan lahan tempat tinggal yang ditempati
3. Jumlah rumah tangga menurut jenis lantai terluas dari tempat tinggal yang ditempati
4. Jumlah rumah tangga menurut jenis dinding dari tempat tinggal yang ditempati
5. Jumlah rumah tangga menurut jenis atap dari tempat tinggal yang ditempati
6. Jumlah rumah tangga menurut air minum
7. Jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan utama
8. Jumlah rumah tangga menurut bahan bakar/energi utama untuk memasak

Sedangkan BPS tahun 2008 menetapkan 8 indikator untuk menentukan rumah tangga

miskin, yaitu:

- 1) Luas lantai perkapita,
- 2) Jenis lantai,
- 3) Air minum/ketersediaan air,
- 4) Jenis jamban,
- 5) Kepemilikan asset,
- 6) Pendapatan perbulan,
- 7) Pengeluaran, dan
- 8) Konsumsi lauk-pauk.

Pendekatan ini lebih sederhana dari pendekatan lainnya namun kelemahannya adalah cenderung mengabaikan perkembangan standar kebutuhan minimum manusia yang mengikuti perkembangan dan kemajuan pembangunan maupun teknologi.

Kriteria Pengukuran Kemiskinan

A. Kriteria Pengukuran Kemiskinan BPS pada PSE05

Badan Pusat Statistik pada 2005 melakukan pendataan untuk penargetan Program Bantuan Langsung Tunai dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005. Sistem pendataan ini disebut Pendataan Sosial-Ekonomi Penduduk Tahun 2005, atau lebih dikenal sebagai PSE05. Tujuan PSE05 adalah memperoleh daftar nama dan alamat rumah tangga miskin, urutan rumah tangga miskin berdasarkan tingkat keparahannya di kabupaten/kota, dan klasifikasi rumah tangga miskin bila digolongkan menjadi sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

Dalam Pengukuran Kemiskinan ini digunakan variabel dengan kriteria sebagai berikut:

Variabel Kemiskinan	Kriteria
Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8m ²
Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
Sumber air minum	Bukan air bersih
Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam	Tidak

	seminggu	
	Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak
	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani gurem, nelayan, pekebun
	Pendidikan kepala rumah tangga	Blm pernah sekolah/Tidak tamat SD
	Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-	Tidak ada

Dengan menggunakan kriteria tersebut BPS mendatangi kantong-kantong kemiskinan untuk memperoleh informasi dari ketua satuan lingkungan setempat, seperti ketua RT ataupun kepala dusun, tentang rumah tangga yang betul-betul miskin. Berdasarkan informasi itu, BPS mendatangi dan mewawancarai kepala atau anggota rumah tangga tersebut secara lebih terperinci.

Hasil pendataan rumah tangga miskin kemudian ditentukan skornya 1 atau 0. Skor 1 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga miskin, skor 0 menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga tidak miskin. Semakin banyak skor 1 yang dimiliki sebuah rumah tangga, semakin miskin rumah tangga tersebut. Meskipun demikian, indikasi rumah tangga miskin satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya sehingga diperlukan pembobotan sebagai penimbang dalam penghitungan rumah tangga miskin. Dari pembobotan tersebut kemudian dihitung nilai indeks untuk memperoleh kategori keparahan kemiskinan suatu rumah tangga yang dibedakan menjadi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga mendekati miskin, dan rumah tangga tidak miskin.

B. Kriteria Pengukuran Kemiskinan BPS pada PPLS 2008

Pemerintah tidak henti-hentinya berupaya mengurangi jumlah dan tingkat kemiskinan melalui berbagai program. Dalam hal sasaran program, pemerintah memperbarui sasaran programnya—misalnya untuk Program BLT—dengan memperbarui datanya. Pada tahun 2008, pemerintah melalui BPS memperbarui data penerima program dengan melakukan pemutakhiran data PSE05 dan dinamai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Pemutakhiran data ini dilakukan pada Oktober 2008 dan dimaksudkan agar manfaat Program BLT menjangkau kalangan yang lebih luas, yaitu rumah tangga yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, pendataan PPLS 2008 tidak hanya menjangkau rumah tangga sangat miskin dan miskin sebagaimana dalam PSE05, tetapi juga rumah tangga yang mendekati miskin.

Pemutakhiran data PSE05 dalam PPLS 2008 menggunakan pendekatan karakteristik rumah tangga dengan 14 variabel kualitatif penjelas kemiskinan, yaitu:

1. Luas lantai perkapita
2. Jenis lantai
3. Jenis dinding
4. Fasilitas buang air besar
5. Sumber air minum
6. Sumber penerangan
7. Bahan bakar
8. Pembelian daging
9. Frekuensi makan
10. Pembelian pakaian baru
11. Kemampuan berobat
12. Lapangan usaha kepala rumah tangga
13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Aset yang dimiliki

Pendekatan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah melalui UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai satu dari beberapa prioritas. Sasaran penanggulangan

kemiskinan ini adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi; mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi, meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin; dan meningkatkan pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.

Dalam pengimplementasiannya, Sumodiningrat (1996) mengelompokkan kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi tiga berdasarkan target/sasarannya, yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat tidak langsung, dimana kebijakan diarahkan untuk memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin. Kebijakan ini lebih diarahkan pada penciptaan kondisi menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyedia sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Kebijakan yang bersifat langsung, dimana kebijakan/program mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
3. Kebijakan yang bersifat khusus, dimana program diarahkan untuk menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya yang sangat khusus. Kebijakan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin di lokasi yang terpencil untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya pada masyarakat setempat.

Mustopadidjaja (1988) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada 3 unsur penting, yaitu:

- 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan,
- 2) adanya dukungan dari terget grup atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan manerima manfaat dari perubahan, dan
- 3) unsur pelaksanaan, baik organisasi maupun program yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sementara itu, Ndraha (1997) berpendapat bahwa sikap dan perilaku merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu, sedangkan perilaku adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau kelompok dalam atau terhadap situasi dan kondisi lingkungan baik masyarakat, alam, teknologi atau juga organisasi.

Dalam rangka mendekati kebijakan publik yang diformulasikan (kebijakan makro) dengan operasionalisasi program-program di lapangan, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu baik kebutuhan program yang berdampak langsung dan berjangka pendek seperti *crash program*, peningkatan usaha produktif dan lain sebagainya, maupun berdampak tidak langsung yang sifatnya berjangka menengah dan panjang seperti penyediaan prasarana dan sarana untuk memberikan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemudahan serta menunjang mobilitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya orang-orang miskin. Kebijakan dan program bantuan sosial yang merupakan *crash program* dalam rangka penanggulangan kemiskinan untuk kelompok rentan perlu diimplementasikan secara baik khususnya dalam hal kriteria dan indentifikasi kelompok sasaran penerima.

Bidang kesehatan merupakan komponen penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan program ini apabila akan diteruskan perlu dilakukan secara komprehensif berbasis

keluarga. Dengan pendekatan keluarga maka program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program peningkatan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita akan terlaksana dengan baik. Juga kepala keluarga akan memperoleh kemudahan dalam mengakses sumber-sumber permodalan, termasuk bantuan dana bergulir atau program padat karya.

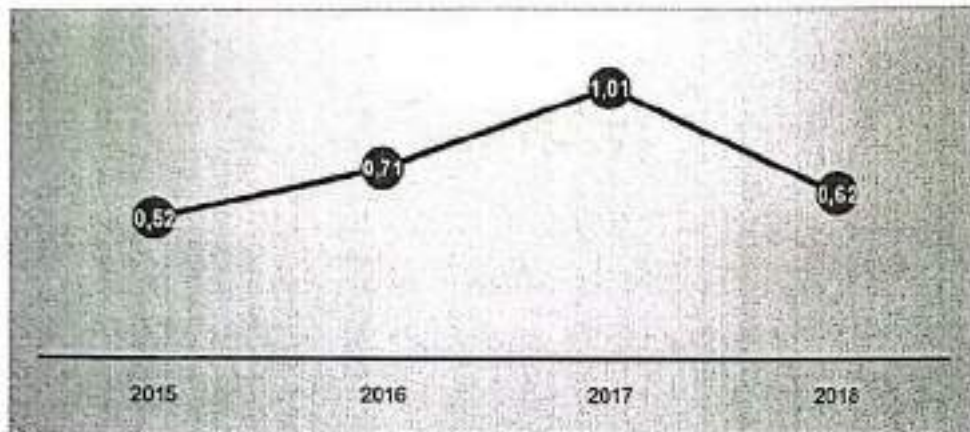
Pada akhirnya dampak dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat tergantung pada kapasitas si miskin sendiri yang tercermin dalam *knowledge*, *attitude* dan *practices* untuk berjuang keluar dari belenggu kemiskinan. Dalam program kemitraan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) maka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UMKM penerima bantuan dana, meningkatkan keuntungan dan mengurangi pengangguran.

Rasio Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) atau biasa juga disebut dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran yang dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai *Poverty Gap* berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Rasio Kesenjangan Kemiskinan ini berguna untuk menghitung besarnya jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada tahun 2014, *Poverty Gap Index* Kota Pontianak berada pada angka 0,52 pada tahun 2015. Angka tersebut meningkat di tahun 2016 dan 2017 menjadi 0,71 dan 1,01, namun kemudian kembali menurun di tahun 2018 menjadi 0,62. Ini mengindikasikan adanya perbaikan pada tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Pontianak dikarenakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati Garis Kemiskinan. Gambar di bawah memperlihatkan terjadinya fluktuasi pada Rasio

Kesenjangan Kemiskinan Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Grafik 4
Rasio Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap*) Kota Pontianak tahun
2015-2018

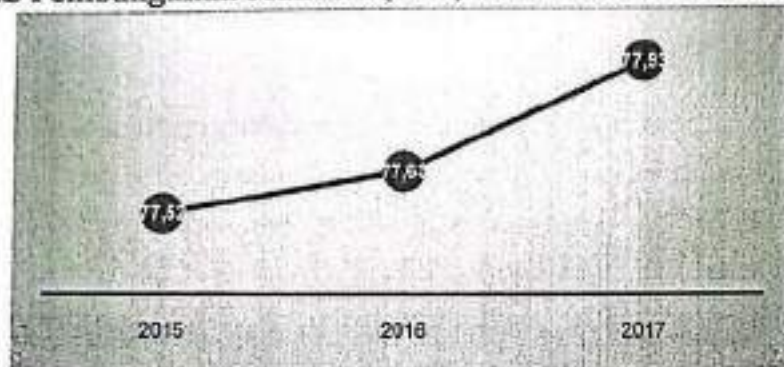


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2018

Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga aspek, meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta aspek hidup layak melalui pengukuran kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. IPM merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

Gambar 5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tahun 2015-



2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

IPM Kota Pontianak menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, IPM Kota Pontianak mengalami kenaikan sebesar 0,11, dari tahun sebelumnya menjadi 77,63. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2017 menjadi 77,93%. Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak berada pada peringkat pertama, indeks ini bahkan berada di atas IPM Nasional yang hanya mencapai 70,81 pada tahun 2017.

BAB IV KAJIAN DAN ANALISIS

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang dihadapi negara-negara di dunia. Fenomena sosial-ekonomi ini merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Karakteristik utamanya adalah rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan baik pangan, sandang, papan maupun pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Fenomena tersebut tentu memerlukan penanganan dengan pendekatan yang sesuai karakteristiknya agar angka kemiskinan yang begitu tinggi dapat dikurangi.

Bila ditilik dari pengertiannya, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut World Bank (2000), definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Lebih lanjut lagi pada tahun 2004 World Bank menjelaskan salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan sumber daya ekonomi. Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik. BPS mendefinisikan

kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK).

Sementara itu menurut para ekonom, Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi : kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Permasalahan kemiskinan tidak dapat teratasi dengan mudah. Untuk mengatasinya tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

GAMBARAN UMUM KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK

Perkembangan Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dimana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Garis Kemiskinan di Kota Pontianak senantiasa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2008 ke tahun 2018 peningkatan garis kemiskinan di Kota Pontianak mencapai 150 persen dari 193.984 rupiah/kapita/bulan meningkat menjadi 483.618 rupiah/kapita/bulan. Artinya, pada tahun 2018, dibutuhkan biaya sebesar Rp 483.618 untuk setiap orang memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan setiap bulannya. Sehingga, apabila terdapat penduduk yang memiliki pendapatan atau rata-rata pengeluaran konsumsi kurang dari Rp 483.618 setiap bulannya pada tahun 2018 akan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 1
Garis Kemiskinan di Kota Pontianak, 2008-2018

Urutan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)
2008	193.984
2009	216.802
2010	242.772
2011	253.357
2012	310.707
2013	341.422
2014	369.079
2015	403.905
2016	427.783
2017	439.648
2018	483.618

Sumber: Badan Pusat Statistik Pontianak

Garis Kemiskinan setiap Kabupaten dan Kota akan berbeda satu dengan yang lain, mengingat setiap kabupaten kota memiliki harga bahan pokok makanan dan non makanan yang berbeda-beda sehingga uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan juga akan menjadi berbeda di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Garis Kemiskinan Kota Pontianak setiap tahunnya merupakan Garis Kemiskinan tertinggi. Hal ini mencerminkan biaya hidup di Kota Pontianak lebih tinggi dibandingkan di kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Garis Kemiskinan yang meningkat setiap tahunnya mengindikasikan terdapat peningkatan harga makanan maupun non makanan yang tergolong sebagai kebutuhan dasar dari tahun ke tahun di Kota Pontianak. Berikut disajikan tabel Garis Kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2018

Nama Wilayah	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah/kapita/bulan)			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN BARAT	323.615	347.880	377.219	409.287
Sambas	329.993	345.066	369.202	407.346
Bengkayang	273.629	291.430	311.815	339.891
Landak	287.822	300.123	320.600	351.942
Mempawah	268.242	292.129	318.682	337.350
Sanggau	250.928	265.067	283.608	312.909
Ketapang	356.319	366.250	391.868	432.354
Sintang	421.877	446.381	477.604	551.704
Kapuas Hulu	346.335	369.981	384.275	430.652
Sekadau	256.452	269.324	288.162	313.930
Melawi	408.635	431.660	461.462	509.138
Kayong Utara	230.320	244.046	260.114	287.078
Kubu Raya	305.859	329.511	359.461	377.302
Kota Pontianak	403.905	427.783	439.648	483.618
Kota Singkawang	376.797	387.801	410.717	464.673

Sumber: Badan Pusat Statistik Pontianak

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Setelah Garis kemiskinan ditetapkan, jumlah penduduk miskin dapat dihitung. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan dimasukkan ke golongan penduduk miskin. Angka kemiskinan di Kota Pontianak selama satu dekade menunjukkan adanya tren penurunan baik dari jumlah maupun persentasenya, kendatipun dari sisi persentasenya sempat mengalami peningkatan pada tahun 2010, 2015 dan tahun 2016. Persentase penduduk miskin di Kota Pontianak pada tahun 2008 mencapai 9,29 persen atau sebanyak 52,80 ribu penduduk, dalam kurun waktu satu dekade berhasil diturunkan menjadi 5,00 persen atau sebanyak 31,76 ribu penduduk.

Berikut disajikan tabel perkembangan penduduk miskin di Kota Pontianak dari tahun 2008 hingga tahun 2018.

Tabel 3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (PO) di Kota Pontianak, 2008-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2008	52,80	9,29
2009	36,56	6,38
2010	36,60	6,62
2011	34,78	6,15
2012	33,22	5,77
2013	32,59	5,56
2014	30,93	5,13
2015	31,56	5,22
2016	34,11	5,55
2017	33,18	5,31
2018	31,76	5,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Pontianak

Dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak berada pada urutan ke 5, setelah Kabupaten Ketapang, Sambas, Landak dan Sintang, dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2018. Namun, bila dilihat dari persentasenya, Kota Pontianak berada pada urutan kedua, setelah Kabupaten Sanggau, dengan persentase penduduk miskin yang terkecil. Hal ini bisa terjadi dikarenakan jumlah penduduk total Kota Pontianak yang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat.

Tabel 4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018

Nama Wilayah	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah/kapita/bulan)							
	2015		2016		2017		2018	
	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KALIMANTAN BARAT	383,70	8,03	381,35	7,87	387,43	7,88	387,08	7,77
Sambas	49,29	9,42	44,88	8,54	45,42	8,50	45,48	8,55
Bengkayang	16,49	6,04	18,04	7,46	18,48	7,51	17,94	7,17
Landak	48,46	13,51	44,55	12,32	44,82	12,23	43,73	11,77
Pontianak	13,88	5,52	14,61	5,75	15,30	5,94	14,61	5,61
Sanggau	20,26	4,57	20,27	4,51	20,62	4,52	21,59	4,67
Ketapang	55,39	11,72	53,07	10,99	54,28	11,02	54,86	10,93
Sintang	36,83	9,33	40,36	10,07	41,46	10,20	42,65	10,35
Kapuas Hulu	23,74	9,66	24,49	9,82	23,96	9,45	24,76	9,60
Sekadau	12,56	6,50	11,97	6,14	12,74	6,46	12,29	6,17
Melawi	24,56	12,57	25,05	12,63	25,28	12,54	26,24	12,83
Kayong Utara	10,41	9,84	10,89	10,19	10,75	9,89	11,13	10,08

Kubu Raya	28,38	5,22	27,83	5,04	29,53	5,26	28,86	5,07
Kota Pontianak	31,86	5,22	34,13	5,55	33,18	5,31	31,76	5,00
Kota Singkawang	11,90	5,76	11,21	5,33	11,61	5,42	11,17	5,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Pontianak

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Selain Garis Kemiskinan, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan perlu diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Tabel 5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018

Nama Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/Kota			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalimantan Barat	1,29	1,30	1,23	1,18
Sambas	1,44	1,30	1,05	1,02
Bengkayang	0,94	1,26	0,94	0,69
Landak	2,36	1,88	1,88	1,82
Mempawah	0,59	0,49	0,65	0,86
Sanggau	0,79	0,74	0,49	0,51
Ketapang	1,74	1,90	1,63	2,00
Sintang	1,15	1,24	1,49	2,16
Kapuas Hulu	1,73	1,43	1,28	1,34
Sekadau	0,69	1,02	1,03	0,53
Melawi	2,40	2,14	2,06	2,00
Kayong Utara	0,75	1,71	1,55	1,47
Kubu Raya	0,77	0,75	0,83	0,63
Kota Pontianak	0,52	0,71	1,01	0,62
Kota Singkawang	0,66	0,66	0,73	0,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Pontianak

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pontianak berada pada kisaran 0,52, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,71, dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,01. Indeks ini mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,62. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 1,01.

Tingginya indeks tersebut menunjukkan bahwa semakin jauhnya rata-rata pengeluaran penduduk Kota Pontianak dari garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2018, Kota Pontianak memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan terkecil ketiga setelah Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Ukuran lainnya untuk melihat kondisi kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan kemiskinan (*poverty severity index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 6
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018

Nama Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalimantan Barat	0,32	0,31	0,29	0,28
Sambas	0,33	0,30	0,24	0,21
Bengkayang	0,22	0,28	0,17	0,11
Landak	0,57	0,35	0,50	0,46
Mempawah	0,10	0,07	0,14	0,25
Sanggau	0,20	0,16	0,09	0,09
Ketapang	0,43	0,50	0,40	0,64
Sintang	0,27	0,26	0,34	0,58
Kapuas Hulu	0,49	0,34	0,27	0,29
Sekadau	0,13	0,22	0,26	0,08
Melawi	0,68	0,57	0,50	0,50
Kayong Utara	0,16	0,45	0,38	0,32
Kubu Raya	0,16	0,17	0,21	0,14
Kota Pontianak	0,10	0,16	0,35	0,14
Kota Singkawang	0,14	0,14	0,17	0,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Pontianak

Seperti halnya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak sebesar 0,10. Indeks ini terus mengalami peningkatan di tahun 2016 dan 2017 dengan nilai 0,16 dan 0,35. Namun pada tahun 2018 dapat diturunkan menjadi 0,14. Indeks tertinggi selama empat tahun belakangan terjadi pada tahun 2017,

ini mengindikasikan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak pada tahun 2018 merupakan indeks dengan nilai terendah keempat setelah Kabupaten Sekadau, Sanggau dan Bengkayang.

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025, tahapan rencana jangka menengah 2015-2019 merupakan periode lima tahunan ketiga dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang mana ditujukan untuk mewujudkan :

1. Pendidikan yang berkualitas yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan didukung biaya pendidikan yang bersumber dari APBD yang makin meningkat dan swasta yang makin berperan aktif positif, terus mengupayakan wajib belajar 12 tahun, peningkatan IPM, terus menurunkan angka buta aksara, melanjutkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, kelayakan mengajar, sertifikasi guru, terus mengupayakan pendidikan gratis bagi anak kurang mampu secara bertahap, didukung oleh pola hidup sehat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan anggaran kesehatan yang makin meningkat, sekaligus dibarengi dengan pelayanan Puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam yang makin optimal dan penambahan dokter spesialis yang mencukupi kebutuhan.

2. Pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang beruntung terus meningkat dan mencakup berbagai bidang kehidupan, gerakan KB makin kuat dan pemerataan persebaran penduduk antar kecamatan makin terwujud, masalah sosial makin terkendali dan angka kemiskinan terus menurun, termasuk korban NAPZA dan HIV/AIDS.
3. Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk berdaya saing, terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi dengan tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing baik di pasar regional maupun di pasar internasional.
4. Terwujudnya koperasi dan usaha kecil menjadi pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan mandiri. Kondisi ini dicapai dengan mewujudnya keharmonisan dan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan usaha besar.
5. Pembangunan jangka menengah ketiga ini untuk peningkatan jalan sesuai standard, fungsi dan lebar, kualitas, sarana penunjang adanya jalur hijau, trotoir dan sarana penyanggah cacat.
6. Disamping focus pada kualitas jalan juga secara bertahap bergeser ke arah peningkatan kualitas lingkungan yang menjadi visikota.
7. Masyarakat mandiri/madani/*civil society* maka dalam penyediaan air bersih juga ditingkatkan peran swasta mengelola air bersih agar tercapai efisiensi dan efektifitas yang tinggi dan daya saing.
8. Transportasi umum dan pribadi yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien.
9. Perencanaan tata ruang dan wilayah diarahkan agar lebih merata dalam pengembangan dan pertumbuhan serta mengurangi kesenjangan.
10. Pemanfaatan ruang yang optimal dan berkeadilan bagi kelompok masyarakat lapis menengah kebawah dalam wujud ruang untuk terbuka umum yang dimungkinkan untuk sector informal. Serta didukung pengendalian tata ruang sesuai daya dukung lingkungan dan upaya untuk mendukung tercapainya kota perdagangan dan jasa.

11. Tahap ketiga RPJM ini diarahkan pada pementapan pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukum. Keamanan dan ketertiban ditingkatkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran pemerintah ditahap ini sudah mulai bergeser ke peran regulator, fasilitator dan stimulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik yang bisa diperankan oleh swasta agar didorong untuk terus dikembangkan.
12. Meningkatkan dukungan pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang optimal
13. Meningkatnya diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistem distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri serta akses fasilitasi standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan
14. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan
15. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengembangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhan Formasi PNS
16. Menciptakan sistem tata kelola dan informasi kepegawaian yang andal
17. Optimalisasi sistem pengukuran kinerja kelembagaan
18. Penyediaan kebijakan pengelolaan aparatur dan analisis jabatan
19. Mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
20. Mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa
21. Mendorong pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan SPM
22. Melakukan kajian dan pendataan wilayah administratif kota
23. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
24. Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi, kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah

25. Memaksimalkan media massa sebagai alat menyebarkan informasi publik, Tersebarinya publikasi informasi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran promosi media cetak dan elektronik
26. Mereview produk hukum daerah dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi daerah serta Mengkaji substansi produk hukum daerah sesuai dinamika perkembangan yang terjadi
27. Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah

Mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJP Kota Pontianak sebagaimana tersebut di atas, maka disusun skenario tahapan pembangunan tahunan yang nantinya akan jabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan (RKPD). Skenario ini akan harus digunakan sebagai acuan dalam merancang focus dari berbagai program dan kegiatan tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang di dalam RPJM ini.

Skenario ini disusun dengan mempertimbangan pentahapan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing-masing misi serta kebutuhan pendanaan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan. Adapun skenario tahunan dari RPJM Kota Pontianak 2015-2019 ini adalah sebagai berikut:

RKPD Tahun I 2015	RKPD Tahun II 2016	RKPD Tahun III 2017	RKPD Tahun IV 2018	RKPD Tahun V 2019
Skenario: Menyiapkan/meletakkan pondasi dasar pembangunan yang kokoh	Skenario: Membangun di atas fondasi dasar kokoh yang telah diletakkan	Skenario: Mendayagunakan dan memperkuat yang telah dibangun	Skenario: Memperkuat dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan visi	Skenario: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan visi
Fokus Pembangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Meletakkan dasar SDM berkualitas dan 	Fokus Pembangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan memantapkan 	Fokus Pembangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan dan menguatkan 	Fokus Pembangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan dan memantapkan 	Fokus Pembangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan dan mengoptimalkan

RKPD Tahun I 2015	RKPD Tahun II 2016	RKPD Tahun III 2017	RKPD Tahun IV 2018	RKPD Tahun V 2019
berdaya saing, <ul style="list-style-type: none"> • Mereduksi kemiskinan, • Menurunkan kekumuhan • Meningkatkan infrastruktur kota (khususnya drainase, dan pembangunan <i>inner ringroad</i>), • Merintis sistem sanitasi perkotaan • Memacu pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sector perdagangan, jasa dan pariwisata 	dasar SDM berkualitas dan berdaya saing; <ul style="list-style-type: none"> • Mereduksi kemiskinan, • Mereduksi pengangguran • Mereduksi penyakit-penyakit sosial masyarakat; • Menurunkan kekumuhan • Pemerataan infrastruktur perkotaan, • Meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan <i>inner ringroad</i>) dan membangun jalan-jalan baru; • Melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan, • Merintis sistem transportasi publik 	SDM berkualitas dan berdaya saing <ul style="list-style-type: none"> • Mereduksi kemiskinan, • Mereduksi pengangguran • Pemerataan pembangunan fisik dan perekonomian • Memantapkan, infrastruktur perkotaan • Meningkatkan kualitas kenyamanan kota • Menurunkan kekumuhan dengan pendekatan pembangunan lingkungan permukiman • Memperkuat sistem sanitasi perkotaan • Memajukan sistem transportasi publik • Meningkatkan akses keterhubungan antar wilayah utara dan selatan 	SDM berkualitas dan berdaya saing <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan berkualitas terjamin untuk seluruh warga • Pendidikan berkualitas bagi seluruh warga • Kemiskinan berkurang • Penyerapan nagkatan kerja tinggi • Akselerasi pertumbuhan ekonomi • Pemerataan kualitas infrastruktur perkotaan • Memperkuat sistem sanitasi perkotaan • Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah • Memajukan sistem transportasi • Memperindah kota 	SDM berkualitas dan berdaya saing, <ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan berkurang dengan signifikan • Penyerapan nagkatan kerja tinggi • Pertumbuhan ekonomi mantap • Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan • Memperkuat sistem sanitasi perkotaan • Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah • Memajukan sistem transportasi • Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota

Gambar

Skenario dan Fokus Pembangunan Pembangunan Tahunan Kota Pontianak Periode 2015- 2019

Tabel

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019

VISI: "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih"			
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman dan pelayanan keagamaan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama serta keharmonisan masyarakat	Memfasilitasi, melakukan pembinaan, mejalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas
2 Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya	Menjalin kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam seni budaya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM seni dan ekonomi kreatif, sistem informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI
		Melestarikan, megembangkan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya daerah	Mengembangkan event dan promosi kebudayaan dan sarana prasarana kesenian untuk mendorong seni budaya dan ekonomi kreatif
		Mempertahankan dan mengembangkan nilai- nilai khasanah seni budaya Kota Pontianak	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan pelaku budaya dalam mengelola dan melestarikan karya aset budaya secara berkelanjutan
3 Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender Menjadikan kota Pontianak Layak Anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	Mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera	Membentuk keluarga berkualitas melalui keluarga
4 Meningkatkan pelayanan dan pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan prestasi kepemudaan	Meningkatkan pemberdayaan potensi kepemudaan	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi olahraga	Meningkatkan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
5 Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI, SLTP/MTS, dan SMA/SWK/MA	Peningkatan akreditasi sekolah dan Penerapan sistem manajemen mutu (Quality Management System)
			Pelaksanaan Pemetaan Sekolah
		Mengurangi angka anak-anak keluarga miskin yang putus sekolah SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA	Meningkatkan motivasi dalam pembelajaran bagi siswa di sekolah Penyelenggaraan penyetaraan bagi masyarakat pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SWK/MA dan Pemberian bantuan Operasional bagi sekolah pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SWK/MA
		Penataan penempatan guru dan peningkatan manajemen pendidikan	
	Meningkatnya pemerataan kualitas tenaga pendidik	Meningkat mutu tenaga pendidik	Melaksanakan kegiatan penyetaraan pendidikan
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan informal, PAUDNI serta pendidikan berkebutuhan khusus	Meningkatkan mutu pendidikan PAUDNI	Optimalisasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan PAUDNI
		Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus
Meningkatnya wawasan masyarakat melalui penguasaan	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan	Membangun sistem perpustakaan yang efektif dan efisien	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya minat baca	perpustakaan,	Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan Pemasyarakatan iptek melalui media belajar sambil bermain
	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip
6 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Meningkatkan kepuasan pelanggan rumah sakit	Pelayanan rumah sakit yang berfokus kepada kepuasan pelanggan
		Meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat	kampanye hidup bersih dan sehat bagi masyarakat
		Meningkatkan efisiensi/ mutu layanan rumah sakit	Peningkatan Pelayanan rumah sakit bermutu sesuai dengan standar
		Pemenuhan standar pelayanan rumah sakit	Pningkatan mutu dan manajemen rumah sakit
		Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit	Mengadakan sarana dan prasarana memenuhi satandar yang ditentukan
		Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan terutama dokter spesialis dan paramedis
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi	Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan bayi
		Meningkatkan kesehatan balita dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
		Peningkatan gizi masyarakat	Penanganan dan pencegahan gizi buruk
		Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Penurunan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
7 Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat	Pengembangan lingkungan yang sehat dan perilaku sehat
8 Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Memperluas pembinaan, kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Memperluas cakupan promosi, penyampaian informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
9 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan
		Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat	Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat
10 Memastikan terlaksananya Jaminan Kesehatan Semesta (<i>Universal Coverage</i>)	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan
11 Menurunkan permasalahan sosial masyarakat	menurunnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatkan upaya pemberdayaan PMKS dan masyarakat dalam kepedulian sosial	Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
			Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
		Meningkatkan ketepatan sasaran penerima beras miskin	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Peningkatan kualitas administrasi dan ketepatan penerima program raskin

Misi 2 :

Menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Profesionalisme dan kinerja aparatur	Peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi	Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengembangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhan Formasi PNS Menciptakan sistem tata kelola dan informasi kepegawaian yang andal
	Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perbaiki dan efisiensi tata laksana, proses kerja,	Optimalisasi Sistem Pengukuran kinerja kelembagaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kelembagaan organisasi, administrasi serta pengukuran kinerja kelembagaan	<p>Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata laksana dan proses kerja</p> <p>Peningkatan fungsi dan kapasitas kelembagaan</p> <p>Penyediaan kebijakan pengelolaan aparatur dan analisis jabatan</p>
			<p>Mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah</p> <p>Mendorong pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan SPM</p> <p>Melakukan kajian dan pendataan wilayah administratif kota</p> <p>Meniaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan</p>
		Meningkatnya kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah	Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah
	Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	<p>Meningkatnya publikasi informasi publik melalui media cetak, elektronik dan media lainnya</p> <p>Meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengenalan produk unggulan daerah</p>	<p>Memalsimalkan media massa sebagai alat menyebarkan informasi publik</p> <p>Tersebarnya publikasi informasi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran promosi media cetak dan elektronik</p>
		Mendorong optimalisasi koordinasi dan kerjasama antar pimpinan, antar lembaga dan antar daerah	Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dan kerja sama antar lembaga, institusi di daerah dan antar daerah
	Tersedianya produk-produk hukum daerah yang mampu mendukung	Mengevaluasi, menata dan mengkaji produk-produk hukum daerah	Mereview produk hukum daerah dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	perkembangan dan dinamika yang berkembang		Mengkaji substansi produk hukum daerah sesuai dinamika perkembangan yang terjadi
		Pembinaan hukum pada masyarakat dan menyelesaikan kasus-kasus hukum pemerintah kota	Menyediakan dukungan bantuan hukum bagi pemerintah kota dan melakukan edukasi pada masyarakat
	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD	mendorong terciptanya profesionalisme aparatur sekretariat dan Anggota legislatif	peningkatan koordinasi, komunikasi, pendidikan dan pelatihan aparatur serta anggota legislatif
	Menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaan masyarakat luas
			Pembinaan dan koordinasi aktif dengan kelompok-kelompok masyarakat
			Peningkatan kinerja lembaga kelurahan dan kecamatan
	Menjadikan database kependudukan yang akurat dan valid sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	meningkatkan dukungan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal
2 Mengarahkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota serta dinamika perkembangan yang terjadi dengan prinsip partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan yang partisipatif, akuntabel dan responsif	Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang kota	Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan baik substansi maupun ketentuan waktu
			Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan ekonomi kota
			Menyediakan perencanaan dan kebijakan pembangunan sosial budaya kota sesuai dinamika yang terjadi
			Menyediakan perencanaan dan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kota sesuai kebutuhan
			Menyediakan hasil-hasil kajian/studi/penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Menyebarkan informasi hasil-hasil perencanaan, kajian, studi serta evaluasi pembangunan kepada masyarakat luas
			Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang
3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah	Meminimalisir terjadinya penyelewengan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pembangunan	Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemertintahan melalui sistem pengawasan yang baik	Meningkatkan sistem pengawasan kinerja dan pengawasan intern dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
4 Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, profesional dan berdaya guna optimal	Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu	Menerapkan sistem pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu	Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah
	Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan tepat waktu	Menerapkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan pengelolaan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Terwujudnya penyampaian SPJ dan laporan keuangan tepat waktu	Menerapkan penyelenggaraan sistem penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah berbasis SAP	Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai SAP
	Terwujudnya validasi sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan validitas sistem pengelolaan aset daerah	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan aset daerah
5 Meningkatkan Penerimaan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam penerimaan pendapatan daerah	Meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah	Mengoptimalkan sumber daya pendapatan asli daerah	Optimalisasi potensi pajak daerah yang belum terealisasi
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	Meningkatkan wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak daerah	Melakukan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban pajak dan wajib pajak daerah

Misi 3 :

Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Menciptakan sistem kesiagaan tanggap bencana yang baik	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan relawan di Kota Pontianak	Mengadakan pelatihan kepada petugas pemadam dan relawan pemadam kebakaran
	Mengembangkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Memenuhi kebutuhan peralatan petugas penanggulangan bencana	Pembelian peralatan petugas penanggulangan bencana
	Penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana	Mendata peristiwa bencana dan memenuhi kebutuhan dasar korban bencana	Meningkatkan keterampilan petugas tanggap bencana Pendataan penanganan peristiwa bencana
	Melakukan pencegahan dini dan menanggulangi korban dari bencana alam	Sosialisasi kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana serta pelatihan rutin untuk relawan dan Tim TRC	Sosialisasi ke SMU/ SWK kewaspadaan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dan pelajar dalam usaha penanggulangan bencana Pelatihan rutin TRC dan relawan
	Meningkatkan sarana dan prasarana kebakaran	Peningkatan ketersediaan peralatan pemadam dan usia pakai peralatan pemadam	Pembelian dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran
2 Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang merata mendukung perkembangan kota dan wilayah	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan dan infrastruktur guna menunjang perekonomian	Meningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru Menyediakan database pengendalian jalan/jembatan dan meningkatkan rasio jalan/jembatan berkondisi baik
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur drainase	Menciptakan sistem drainase yang mampu menanggulangi banjir dan genangan	Optimalisasi dan integrasi sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran Mengendalikan genangan dan banjir

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas alat-alat berat penunjang kegiatan	Pengadaan dan pemeliharaan berkala alat-alat berat	Pengadaan pralatan kerja sesuai kebutuhan dan pemeliharaan kondisi peralatan kerja
	Terwujudnya sistem transportasi kota yang aman, nyaman, tertib dan mendorong konektivitas antar wilayah	Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat (lalu lintas) dan air Meningkatkan dan menata parkir perkotaan	Pengembangan serta meningkatkan keandalan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana Pengembangan sistem perparkiran yang baik pada kawasan-kawasan kota
		Mengoptimalkan sistem perangkutan sungai untuk menunjang sistem transportasi darat	Pengembangan sarana perhubungan sungai sebagai alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas di ruas jalan
		Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalulintas	Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Dalam BerLalu Lintas
3 Menyediakan utilitas perkotaan yang merata untuk melayani aktivitas dan perkembangan kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Menerangi setiap ruas jalan-jalan yang menjadi kewenangan kota	Meningkatkan cakupan ruas jalan kota dan lingkungan yang diterangi oleh PJU
	Meningkatnya pengelolaan sampah kota	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan	Meningkatkan pelayanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
			Optimalisasi tata kelola Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
			Meningkatkan tata kelola Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasana pengolahan sampah
	Menggali potensi pembiayaan pengelolaan sampah dari masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketentuan pembuangan sampah		
	Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya	Meningkatkan partisipasi serta keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya image kota melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Perluasan, penataan dan pemeliharaan kualitas Ruang Terbuka Hijau perkotaan

Misi 4 :

Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Terwujudnya kualitas dan keseimbangan kelestarian lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	Penegawasan dan penertiban tempat usaha
	Terwujudnya pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran udara dan air dari kegiatan usaha	Pemasyarakatan regulasi lingkungan
		Meningkatkan kegiatan penghijauan lingkungan	Mendukung pelestarian lahan melalui penghijauan lingkungan
		Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup	Respon cepat dan tanggap terhadap pengaduan yang masuk
2 Menerapkan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota	Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan pada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Penyederhaan perijinan dalam pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah dsbnya.
			Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat : bantuan stimulant rumah tidak layak huni/WC
		Merwujudkan kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis dan berkelanjutan	Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan (pembangunan jalan dan drainase lingkungan, bantuan material jalan lingkungan, pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih)
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan-jalan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mendorong penyediaan PSU pada kawasan perumahan yang dibangun pengembang dan menyediakan dukungan PSU pada kawasan permukiman
3 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup perkotaan	Menciptakan sanitasi perkotaan yang ideal	Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat	meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana sanitasi
		Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan	Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan melalui integrasi program/kegiatan
	Menciptakan kualitas lingkungan kota yang asri dan tertata dengan baik	Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilayah melalui penataan kawasan	pengembangan dan peningkatan kualitas bangunan dan kawasan di Kota Pontianak
		Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang	Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

Misi 5 :

Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima bagi masyarakat	Terwujudnya pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat yang mudah, cepat, dan transparan	Memperbaiki kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	Meningkatkan capaian kinerja layanan perijinan dan penanaman modal
2 Meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban dalam berusaha yang lebih kondusif	Terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam berusaha	Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Menegakkan dan memasyarakatkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan/ sosialisasi Perda
		Pengamanan aset daerah dan pengawalan pejabat daerah	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat serta memberdayakan Poskamling di Kelurahan
	Terciptanya kewaspadaan dini dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat	Optimalisasi koordinasi dan pembinaan	Pembinaan sosial politik dan wawasan kebangsaan bagi parpol dan kelompok masyarakat
3 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Pontianak, sehingga memberikan dorongan peningkatan penerimaan pendapatan daerah	Pengembangan sumber daya, destinasi dan investasi wisata Meningkatkan promosi pariwisata yang tepat sasaran
		Terciptanya kesempatan kerja diberbagai sektor	Mengembangkan bursa tenaga kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja
	Meningkatnya peran Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	Meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan iptek	Mengoperasionalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu
			Memfasilitasi bimbingan pelatihan bagi KUMKM
		Mendorong penyerapan modal usaha KUMKM	Mengoptimalkan peran perbankan terutama Bank Kalbar dan lembaga keuangan non bank untuk penyaluran pembiayaan bagi koperasi dan UMKM
	Meningkatnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Meningkatkan ekspor, mengendalikan impor dan meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung peningkatan efisiensi sistem distribusi dan pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitasi standarisasi produk lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan pengamanan perdagangan
		Meningkatkan basis industri kreatif yang menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor	Meningkatkan industri berbasis kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif
	Meningkatnya produktifitas pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan peranan UPTD SKPD	Penyediaan sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura
4 Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan	meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pemenuhan ketersediaan dan distribus barang-barang konsumsi untuk keamanan pangan	Meningkatkan capaian kinerja distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan
5 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang pangan	Meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakan serta kelembagaannya	Menambah keahlian ketereampilan dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan metode baru

PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD KOTA PONTIANAK

No	OPD	Program/Kegiatan yang Harus Disediakan	Pagu (2018)	Masukan
1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan a. Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat (2016) b. Pelatihan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat (2016) 2. Program Peningkatan Peduli Perempuan dan Anak a. Pembinaan Terhadap Keterampilan Perempuan 3. Program Keluarga Berencana a. Pengadaan Sarana dan Bahan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan dan Pelayanan KB 4. Program Keluarga Sejahtera a. Pembinaan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Rp 104.675.000 Rp 101.275.000 Rp 31.050.000 Rp 311.495.000 Rp 102.255.000 Rp 44.247.600	(1) Biasanya program yang diberikan sesuai dengan permintaan masyarakat yang tertuang dalam Musrembang sehingga terkadang pesertanya tidak berkembang (2) Evaluasi tidak bisa terlaksana dengan maksimal karena terkendala dana yang tidak mencukupi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Program pemberian bantuan masuk sekolah bagi siswa miskin 2. Program Indonesia Pintar (PIP) a. Kartu Indonesia Pintar (KIP) - SD - SMP 3. Program Pembinaan dan Pengelolaan Tutor PAUD PKK a. Bahan Pembelajaran PAUD Belanja Seragam Peserta Didik b. Belanja Seragam Peserta Didik	Rp 3.102.650.000 Rp 5.038.875.000 Rp 3.523.875.000 Rp 60.000.000 Rp 75.000.000	
3	Dinas Kesehatan			
4	Dinas Sosial	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya		

6	Badan Daerah				(1) Tidak ada kegiatan langsung untuk pengentasan kemiskinan (2) Untuk hibah dan bantuan sosial, hanya verifikasi saja (3) Hibah dan bansos, BKD di bantu OPD terkait
7	Dinas Pangan, dan Perikanan	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat a. Pemberdayaan Pekarangan Pangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (2017) 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan b. Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan c. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah d. Pengembangan Diversifikasi Pangan 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan a. Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura - Sarana Prasarana Pengembangan Desa Model (2017) - Sarana Prasarana Pengembangan Pekarangan Sekolah (2017) - Sarana Prasarana Lomba Kelurahan (2017) - Sarana Prasarana Kebun PKK (2017) - Sarana Prasarana Tanaman Sayuran (2017) - Sarana Prasarana Program Pemberdayaan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (2017) - Sarana Prasarana Hidroponik (2016) - Sarana Prasarana Pendukung Pertanian Organik (2016) - Sarana Prasarana Bawang Merah (2017) - Sarana Prasarana Cabe (2017)	Rp 60.000.000 Rp 48.390.000 Rp 99.835.000 Rp 1.188.710.000 Rp 70.560.000 Rp 635.345.000 Rp 120.000.000 Rp 60.000.000 Rp 20.000.000 Rp 25.000.000 Rp 40.000.000 Rp 20.000.000 Rp 55.000.000 Rp 18.100.000 Rp 85.000.000 Rp 50.000.000		1. Kodepan mungkin bisa dilaksanakan ranstra daerah (2) Setiap bidang di dinas memiliki program pengentasan kemiskinan

- Sarana Prasarana Tanaman TOGA (2017)	Rp	10.000.000
- Mini Hidroponik dalam Rangka Pelatihan (2017)	Rp	7.000.000
- Pemanfaatan Pekarangan		
- Sarana Prasarana Budidaya Buah		
4. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Petanian		
a. Pelatihan / Sosialisasi / Pertemuan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil (2017)	Rp	8.950.000
b. Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha Pengolahan		
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (2017)	Rp	42.550.000
- Bantuan Peralatan Pemurnian Air (2017)	Rp	65.000.000
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		
a. Pengembangan Sumber Air (DAK)		
- Pengembangan Irigasi Air Tanah Dangkal / Dalam (2017)	Rp	200.000.000
- Pembangunan Embung (DAK) (2017)	Rp	388.050.000
b. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) (2016)	Rp	118.492.780
c. Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani	Rp	125.000.000
d. Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan		
e. Pembangunan Jalan Pertanian (DAK)		
- Pembangunan Jalan Usaha Tani (2016)	Rp	85.000.000
- Pembangunan Jalan Produksi (2016)	Rp	142.500.000
f. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Produksi Pangan	Rp	344.000.000
- Sarana Prasarana Pengembangan Padi (2017)	Rp	113.650.000
- Sarana Prasarana Pengembangan Keladi (2017)	Rp	30.000.000
- Sprayer (2017)	Rp	24.850.000
- Gerobak Dorong Roda 1 (2017)	Rp	21.700.000

6. Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani			
a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis		Rp	74.221.000
b. Operasional Penyuluh Pertanian		Rp	80.119.360
7. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal			
a. Pembinaan dan Penyediaan Bibit / Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Rp	30.102.500
8. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya			
a. Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar (2016)		Rp	393.406.000
- Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar			
- Demplot Pembuatan Pakan Ikan			
- Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan			
- Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)			
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya		Rp	380.000.000
c. Pemantauan dan Pembinaan Cara Budidaya dan Pembenhian Ikan Yang Baik		Rp	99.593.000
d. Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan melalui Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahaya Utama Ikan		Rp	106.728.300
e. Dukungan FORIKAN Kota Pontianak		Rp	36.340.200
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Tangkap			
a. Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap (2017)		Rp	65.598.000
b. Pembinaan Teknis Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap (2017)		Rp	29.997.000
c. Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		Rp	447.098.000
d. Pembinaan Teknis Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Bagi Nelayan		Rp	38.000.000
10. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah			

		Serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan		
		a. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sarana P2HP Serta Manajemen Usaha Kepada Kelompok P2HP Calon Penerima Paket Bantuan P2HP (2017)		Rp 105.310.000
		- Pengadaan Peralatan Pembinaan P2HP		
8	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
		a. Pelatihan Berbasis Kompetensi		Rp 107.570.000
		b. Pelatihan Berbasis Masyarakat		Rp 133.100.000
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM		
		a. Pengadaan Sarana Prasarana Gedung UMKM		Rp 207.415.000
		b. Layanan konsultasi pengembangan usaha KUMKM (2016)		Rp 80.000.000
		2. Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi UMKM		
		a. Pengembangan sarana/prasarana KUMKM (2017)		Rp 503.640.000
		b. Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM Pontianak Barat		Rp 197.300.000
		c. Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM Pontianak Utara		Rp 154.362.000
		d. Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM Pontianak Selatan		Rp 118.866.000
		e. Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM Pontianak Timur		Rp 161.421.000
		f. Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM Pontianak Tenggara		Rp 76.395.000
		g. Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM Pontianak Kota		Rp 75.740.000
		h. Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan Dan Kemitraan KUMKM		Rp 38.950.000
		3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
		a. Pelatihan dan Motivasi Kewirausahaan		Rp 265.274.000
		4. Program Perlindungan Konsumen dan Penguatan Perdagangan		
		a. Fasilitasi Pasar murah menjelang hari raya		Rp 26.007.600
		5. Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif		

(1) perlu diadakan evaluasi peserta pelatihan, rencana evaluasi tahun 2019 (2) Untuk tahun 2020 akan diadakan pelatihan kewirausahaan

(1) Masing-masing OPD terkesan berjalan sendiri (2) Perlu dibentuk kelompok ekonomi kreatif

		a. Pengujian dan Money PRODUK PANGAN IRT/IKM	Rp	33.100.000	
		b. Pelatihan dan Implementasi teknis desain packaging	Rp	48.500.000	
		6. Program Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)			
		a. Pembinaan dan Pelatihan IKM	Rp	263.525.000	
		7. Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka			
		a. Pelatihan Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika Dan Aneka			
10	Dinas Perumahan dan Rakyat Kawasan Permukiman Kota Pontianak	1. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman			
		a. Penataan Kualitas Lingkungan Permukiman	Rp	68.100.000.000	
		b. Biaya Operasional Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP)	Rp	69.140.000	
		c. Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman	Rp	14.970.000.000	
		d. Revitalisasi Kawasan Kumuh Melalui Perbaikan Lingkungan Permukiman	Rp	1.313.232.000	
		e. Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Rp	66.970.000	
		f. Pendataan Rumah di Kota Pontianak (2017)	Rp	164.870.000	
		2. Program Pengembangan Perumahan			
		a. Pengelolaan Rusunawa	Rp	443.813.040	
		b. Fasilitasi Pembangunan Rusunawa	Rp	59.000.000	
		3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			
		a. Fasilitasi Bantuan Teknis Untuk Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Rp	42.500.000	
		b. Fasilitasi Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kemen PUPR	Rp	231.370.000	
		c. Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (DAK)	Rp	160.007.000	
		1. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman			
11	Dinas Pekerjaan				

12	Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Pontianak Timur	<p>a. BOP Sanimas IDB</p> <p>1. Program Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>a. Bantuan Material Penataan Lingkungan</p> <p>b. Pembinaan Gotong Royong (2017)</p> <p>c. Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)</p> <p>2. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>a. Pembinaan Inovasi Unggulan Kelurahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan (2017)</p> <p>b. Fasilitasi Kegiatan Lomba-Lomba (2017)</p> <p>3. Program Pembinaan Lembaga Masyarakat</p> <p>a. Pembinaan Kegiatan Posyandu (2017)</p> <p>b. Fasilitasi Hari-Hari Besar (KUT Kota Pontianak) (2017)</p> <p>c. Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan Kecamatan (2017)</p> <p>d. Fasilitasi Kegiatan PKK (2017)</p> <p>e. Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kecamatan (2017)</p> <p>f. Pembinaan Stimulan Porseni Kecamatan (2017)</p> <p>g. Pembinaan Forum Anak (2017)</p> <p>h. Pembinaan MTQ/STQ Kecamatan (2017)</p> <p>i. Pembinaan Masyarakat Pemuda / Remaja Peduli Lingkungan dan Sadar Wisata (2017)</p>	<p>Rp 850.000.000</p> <p>Rp 1.216.520.000</p> <p>Rp 21.960.000</p> <p>Rp 5.625.000</p> <p>Rp 38.762.100</p> <p>Rp 35.080.000</p> <p>Rp 39.300.000</p> <p>Rp 20.000.000</p> <p>Rp 96.470.400</p> <p>Rp 11.000.000</p> <p>Rp 22.000.000</p> <p>Rp 92.055.000</p> <p>Rp 94.140.200</p> <p>Rp 68.232.000</p>	<p>(1) Ada indikasi rastra diberikan ke sasaran yang tidak sesuai (2) Bantuan material terkadang tumpang tindih dengan program dewan, sehingga perlu diperhatikan (3) Kegiatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dirasa kurang perencanaan, karena terkadang peserta dan jenis pelatihan sama (4) Diharapkan ada pelatihan yang berguna secara langsung oleh masyarakat misalnya pelatihan fardhi kifayah</p>
13	Kecamatan Pontianak Barat	<p>1. Program Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>a. Monitoring Penyaluruh Raskin Kecamatan (2017)</p>	<p>Rp 39.200.000</p>	<p>(1) Untuk saat ini data beras sejahtera (rastra) didapatkan dari pusat, kenyataan dilapangan banyak warga tidak mampu masih belum mendapatkan bantuan tersebut. (2) Kecamatan diminta data peserta pelatihan</p>

		b. Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Rasjin Sejahtera (rastra)	Rp 52.770.000	yang akan dilaksanakan OPD, tapi apakah ada hasil dari pelatihan tersebut, data-data tersebut belum diketahui dan perlu dievaluasi. (3) Kecamatan merasa belum diflbitkan secara aktif oleh OPD, hanya sebatas monitoring (4) Perlu evaluasi program yang telah dilakukan OPD apakah tepat sasaran atau tidak
14	Kecamatan Pontianak Kota	I. Program Pemberdayaan Masyarakat		
15	Kecamatan Pontianak Utara	a. Sosialisasi, Monitoring dan Penyaluran Beras Sejahtera (rastra)	Rp 72.240.000	
16	Kecamatan Pontianak Tenggara			
17	Kecamatan Pontianak Selatan			(1) Pengawasan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan dianggap kurang sehingga output tidak dapat diketahui terlaksana atau tidak (2) Untuk kedepannya dapat dipikirkan inovasi mengenai pengenalan kemiskinan mengenai anak terlantar dan orang gila. (3) Perlu evaluasi bagi penerima bantuan, karena tidak selamanya orang miskin selalu miskin

Dari data yang didapatkan dari Kecamatan didapatkan beberapa kendala terkait program yang dilaksanakan OPD maupun program yang dilaksanakannya terkait penanggulangan kemiskinan, yaitu :

1. Pada program-program pelatihan yang dilakukan beberapa OPD seperti Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Koperasi, Usaha dan Perdagangan selama ini pihak Kecamatan telah memberikan nama peserta pelatihan yang nantinya akan diikuti sertakan pelatihan, tapi hanya menyerahkan nama saja. Untuk hasil dari pelatihan atau evaluasi dari pelatihan atas nama-nama yang mereka kirimkan tidak pernah di terima oleh Kecamatan. Sehingga mereka tidak mengetahui apakah hasil dari pelatihan tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya atau tidak.
2. Untuk program rastra yang dilaksanakan Kecamatan yang merupakan program dari pusat, dimana data penerima juga merupakan hasil data yang di oleh pemerintah pusat dirasa perlu dilaksanakan evaluasi. Dikarenakan tidak selamanya masyarakat miskin yang tercatat akan selamanya berada kemiskinan dan masih terdapatnya banyak keluarga miskin yang belum tercatat di database. Evaluasi diperlukan untuk meng-update database pusat penerima rastra. Agar dapat tepat pada sasaran sebenarnya.
3. Tidak dilibatkannya Kecamatan dalam program yang dilaksanakan OPD dalam penanggulangan kemiskinan, dimana hingga saat ini pihak Kecamatan dilibatkan pada tahap monitoring saja. Sedangkan kecamatan merupakan OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat penerima program.
4. Diperlukannya perencanaan yang lebih matang terhadap program yang berbentuk pelatihan dimana pelatihan yang diberikan terkesan sama dan sel pelatihan yang diberikan adalah pelatihan yang berguna secara langsung bagi masyarakat seperti pelatihan Fardu Kifayah.
5. Kendala yang dihadapi dalam melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan OPD adalah dana untuk kegiatan evaluasi, sehingga evaluasi terlaksana
6. Terkesan OPD masih berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program, sehingga terdapat program yang memiliki keminipan. Seperti pada tahun ini Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP akan merencanakan mengadakan pelatihan kewirausahaan sedangkan Dinas Koperasi, Usaha dan Perdagangan juga memiliki program pelatihan bagi kewirausahaan juga.

BAB V

PENUTUP

Kemiskinan masih merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dimana dalam target RPJMD Kota Pontianak 2014 - 2019 yang mencanangkan target penurunan tingkat kemiskinan dibawah 5 persen pada akhir tahun 2019. Hal ini tentulah harus mendapat pointer utama dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap OPD dalam menangani dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak.

Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak antara lain :

1. Memperbaiki program perlindungan social
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
4. Menciptakan pembangunan yang inklusif

Strategi 1 : Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sistem perlindungan social bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan social dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

Strategi 2 : meningkatkan Akses Terhadap pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital)

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 3 : Pemberdayaan Kelompok masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai objek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, social dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun social.

Strategi 4 : Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus member manfaat kepada seluruh masyarakat.

Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai Negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh dinamis. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang stagnan hamper bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif didalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor pedesaan dan pertanian. Daerah pedesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat dimana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian pedesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Implikasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan didaerah adalah pembentukan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan) yang dilegitimasi dengan Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem kelembagaan bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di daerah sebagaimana direncanakan dalam RPJMD, sekaligus memantau relevansi arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD terhadap pemenuhan target pengurangan angka kemiskinan nasional dan SDG's.

Kinerja TKPKD salah satunya diukur dengan mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dokumen SPKD adalah dokumen strategi

penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD dengan masa berlaku 1 periode kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, dokumen SPKD penting sekali untuk disusun secara mandiri oleh sumberdaya TKPK sendiri (bukan pihak ketiga), bersifat evaluatif dan menjadi payung bagi program penanggulangan kemiskinan selanjutnya.